

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Aceh di 5 kabupaten/kota IHK, pada Desember 2024 terjadi inflasi y-on-y sebesar 2,17 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,93 pada Desember 2023 menjadi 107,21 pada Desember 2024. Tingkat inflasi m-to-m di Provinsi Aceh pada Desember 2024 sebesar 0,57 persen dan tingkat inflasi y-to-d Provinsi Aceh pada Desember 2024 sebesar 2,17 persen.

Inflasi Aceh di tahun 2024 berada pada sasaran inflasi nasional yang sebesar $2,5\% \pm 1\%$. Inflasi Provinsi Aceh secara tahunan bulan Desember 2024 lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya dan bulan yang sama di tahun 2023.

Penyumbang utama inflasi pada Desember 2024 secara y-on-y adalah kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 1,14%. Adapun 10 komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Desember 2024, antara lain : Emas Perhiasan sebesar 0,34%, Tarif Air Minum PAM sebesar 0,32%, Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebesar 0,32%, Minyak Goreng sebesar 0,26%, Daging Ayam Ras sebesar 0,12%, Tomat, Telur Ayam Ras, Bawang Merah, Cumi-cumi dan Kopi Siap Saji.

Penyumbang utama inflasi pada Desember 2024 secara m-to-m adalah kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 0,56%. Adapun 10 komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi secara m-to-m pada Desember 2024, antara lain : Telur Ayam Ras sebesar 0,10%, Ikan Bandeng/Ikan Bolu sebesar 0,05%, Ikan Tongkol/Ikan Ambu-ambu, Beras, Ikan Kembung/Ikan Gembung/Ikan Banyar/Ikan Gembolo/Ikan Aso-Aso, dan Minyak Goreng masing-masing sebesar 0,04%, Kelapa, Cabai Rawit, Ikan Dencis, dan Daging Ayam Ras. Sedangkan komoditas yang mengalami deflasi m-to-m, antara lain : Tomat sebesar 0,02%, Jeruk, Jeruk Nipis/Limau masing-masing sebesar 0,01%, Emas Perhiasan, dan Angkutan Udara.

Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Antar Wilayah Cakupan IHK

Pada Desember 2024, seluruh kota IHK di Provinsi Aceh yang berjumlah 5 kabupaten/kota mengalami inflasi y-on-y. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kota Meulaboh sebesar 3,29% dengan IHK sebesar 108,63% dan terendah terjadi di kabupaten Aceh Tengah sebesar 1,63% dengan IHK sebesar 108,18%.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.
 - Ketergantungan komoditi pangan dengan daerah lain (Sumatera Utara) sehingga harga komoditi menjadi tinggi karena biaya distribusi dan produksi tinggi.
 - Aceh belum memiliki pabrik/produksi minyak goreng.
 - Masih kurangnya kegiatan KAD dengan daerah penghasil komoditi untuk ketersediaan stok.
 - Daerah sentra komoditi menjual hasil komoditi pangannya ke luar daerah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan lokalnya.
3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi di Daerah bersama Mendagri pada tanggal 2, 7, 14, 21, dan 28 Oktober 2024.
- Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi di Daerah pada tanggal 4, 11, 18, dan 25 November 2024.
- Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi di Daerah pada tanggal 3, 9, 16, 23 dan 30 Desember 2024.
- Rapat Persiapan Penyusunan Rekomendasi HLM TPID dan TP2DD Se-Aceh Tahun 2024 pada tanggal 28 Oktober 2024.
- Sosialisasi Kebijakan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Pestisida Tahun 2024 pada 21 November 2024.
- Rapat Bersama TPID Kabupaten Aceh Tengah TPID Aceh terkait Pengendalian Pendistribusian Energi Bersubsidi LPG 3 Kg pada tanggal 25 November 2024.
- Rapat Identifikasi Kondisi dan Kebutuhan Irigasi Pemerintah Aceh dan Percepatan RDTR pada tanggal 16 Desember 2024.
- TPID Aceh melalui Biro Perekonomian Setda Aceh selaku Sekretariat TPID setiap hari kerja secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan harga 20 komoditi dan upaya konkrit pengendalian inflasi kabupaten/kota melalui aplikasi <https://bit.ly/waspengendalianinflasi> serta aplikasi SP2KP
- TPID Aceh melalui Dinas Pangan Aceh melakukan Fasilitas Distribusi Pangan berupa Bantuan Ongkos Angkut kepada distributor pemasok bahan pangan ke Aceh dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, untuk komoditi Minyak Goreng Curah pada tanggal 12 s.d 13 Desember 2024 dari Provinsi Sumatera Utara ke Pasar Induk Lambaro Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh sebanyak 165,150 Kg dengan anggaran sebesar Rp.180.914.500,-.
- TPID Aceh melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh melaksanakan kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah yaitu :
- Operasi Pasar Beras Murah Tanggap Inflasi Aceh di 17 Kabupaten/Kota di 50 titik pada tanggal 18 s.d 21 November 2024 dengan anggaran sebesar Rp.1.954.000.000,-.
- TPID Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh melakukan kegiatan Pasar Tani yang sebanyak 21 kegiatan pada bulan Oktober s.d Desember 2024. Kegiatan tersebut bertujuan membantu memasarkan produk hortikultura langsung dari petani/kelompok tani baik segar maupun olahan dengan cara mendekatkan/menjual produk yang masih segar dan bermutu ke konsumen.
- TPID Aceh melalui Dinas Pangan Aceh melaksanakan kegiatan Bazar Pangan Murah yang dilaksanakan pada tanggal 1 dan 19 Oktober 2024 di 2 titik lokasi. Selanjutnya pada tanggal 13,16,20,21 dan 22 November 2024 di 7 titik lokasi. Selanjutnya pada tanggal 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16 dan 17 Desember 2024 di 19 titik lokasi.
- TPID Aceh melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh melakukan kegiatan pemberian ikan Gemarikan (Gemar Makan Ikan) dan pelatihan diversifikasi produk perikanan serta pemberian bantuan ikan segar dan olahan ikan.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Kegiatan Operasi Pasar/Pasar Murah dan sejenisnya berhasil mengintervensi harga bahan kebutuhan pokok masyarakat disebabkan harga komoditi dijual di bawah harga pasar.

Optimalkan Gerakan menanam pangan holtikultura.

- Memperkuat KAD daerah sentra dan non sentra serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi fasilitasi distribusi pangan antar daerah.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah

- Pemantauan dan pencatatan harga bahan pangan pokok.
- Optimalisasi program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (SPHP) untuk komoditi Beras.
- Melanjutkan kegiatan Operasi Pasar/Pasar Murah untuk menjaga keterjangkauan harga.
- Pelaksanaan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang.
- Perluasan Gerakan Menanam Bawang Merah dan Cabai Merah.
- Mendorong hilirisasi pengolahan Cabai Merah dan Bawang Merah.
- Subsidi biaya angkut.
- Optimalisasi pemanfaatan *cold storage* untuk komoditas perikanan.
- Peningkatan produksi/tangkapan/budidaya komoditas perikanan penyumbang inflasi.
- Pembangunan dan optimalisasi sarana produksi dan infrastruktur pertanian (Pembangunan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi, kanal pengendalian banjir
- *Learning Center* untuk peningkatan produksi komoditas holtikultura, peternakan, dan perikanan.
- Pengaturan jadwal tanam komoditas pangan.
- Perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) di setiap kabupaten/kota baik intra provinsi maupun antar provinsi.
- Peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah guna mendukung kelancaran pergerakan logistik bahan pangan, antara lain: pemanfaatan tol laut.